

GAJI DIPOTONG, RATUSAN PEGAWAI TAK BISA BEROBAT

RSUD TUNGGAK IURAN BPJS

EUSEBIUS SARA-RENGGA YULIANDRA,
Batujai

BELUM selesai persoalan tunggakan gaji bulan Desember 2017 dan remunerasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, kini ratusan pegawai tidak tetap (PTT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam kembali dihadapkan persoalan serius. Mereka tak bisa berobat karena status keanggotaan BPJS Kesehatan non-

aktif.

Ternyata sudah beberapa bulan belakangan ini manajemen RSUD tidak membayar premi atau iuran BPJS Kesehatan. Persoalan ini pernah disuarakan para pegawai tidak tetap itu sejak sebulan lalu. Namun sampai saat ini belum juga ditindaklanjuti oleh manajemen rumah sakit plat merah itu.



F. CECEP MULYANA/HP
drg Ani Dewiyana

"Kami sudah cukup bersabar. Hanya diberi janji-janji. Dua minggu lalu dijanjikan diselesaikan, minggu kemarin dijanjikan lagi. Tapi sampai minggu ini belum juga ada titik terang. Entah sampai kapan?" ujar seorang PTT kepada *Batam Pos*, Kamis (8/3).

Akibatnya, kata sumber itu, para PTT dan anggota keluar-

ganya yang menjadi tanggungan terpaksa harus merogok kocek lagi untuk berobat. "Tahu lah, pekerjaan kami ini berisiko terjangkau berbagai penyakit. Tiap hari dekat dengan orang sakit. Tapi kami sendiri tak punya proteksi (perlindungan). Anak isteri sakit juga harus bayar sendiri," keluh pegawai tadi.

Dia menyayangkan pihak manajemen tak bisa memberikan solusi kendati sudah



Januari, Februari tak ada masalah. Cuman Desember (2017) saja, itupun tak semua. Sudah minta rincian (tunggakan) ke BPJS tapi belum dikasih.

drg ANI DEWIYANA

Direktur RSUD Embung Fatimah-Batam

■ Baca RSUD...Hal 10

RSUD Tunggak Iuran BPJS

Sambungan dari hal 9

berulang kali disuarakan para PTT. Mereka menduga ada indikasi penyelewengan dana iuran BPJS Kesehatan, karena gaji untuk iuran BPJS tersebut tetap dipotong setiap bulan.

"Gaji tetap dipotong (untuk iuran BPJS) tapi kok tak aktif. Ada apa ini?" tanya sumber itu.

Direktur RSUD Embung Fatimah Batam drg Ani Dewiyana saat dikonfirmasi mengakui adanya persoalan itu. Menurut dia, tunggakan iuran BPJS Kesehatan itu untuk bulan Desember saja. Pihaknya sudah berupaya melunasi tunggakan tersebut, tapi rincian belum diberikan pihak BPJS Kesehatan.

"Januari, Februari tak ada masalah. Cuma Desember (2017) saja, itupun tak semua. Sudah minta rincian (tunggakan) ke BPJS tapi belum dikasih," ungkap Ani yang baru menjabat sebagai Dirut RSUD, kemarin.

Kepada wartawan, Ani menegaskan persoalan itu tidak

berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Sebab pihaknya juga sudah meminta keringanan pada BPJS Kesehatan untuk tetap melayani PTT yang membutuhkan pelayanan medis dengan kartu BPJS yang ada.

Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan saat dikonfirmasi belum mau berkomentar banyak, sebab harus melalui pengecekan terlebih dahulu. Namun mereka mengakui jika sebulan saja peserta tak membayar iuran BPJS otomatis kartu BPJS dinonaktifkan.

"Iya, aturan baru memang seperti itu. Cuma masalah RSUD ini kami cek dulu," ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan Kota Batam Irfan Humaidi, kemarin.

Sekadar diketahui, saat ini pegawai RSUD masih didominasi PTT. Total pegawai dan petugas medis di rumah sakit bertipe B itu ada 623 orang. Berstatus PNS hanya 243 orang, selebihnya 380 pegawai, termasuk 20 dokter masih berstatus honor baik PTT ataupun PT BLUD.

DPRD Kota Batam menyayangkan tidak dibayarnya iuran BPJS Kesehatan ratusan PTT di RSUD Embung Fatimah. Menurut Anggota Komisi IV DPRD Batam Aman, persoalan ini bisa menjadi temuan baru bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Jika informasi ini benar tentu sangat memprihatinkan dan menambah penilaian buruk kinerja RSUD. Kalau ini tak segera diatasi akan sangat berbahaya, dan menjadi temuan baru," sesal Aman kemarin.

DPRD Batam akan memastikan alasan pihak RSUD tidak membayar iuran BPJS mereka. Sebab, sudah menjadi kewajiban instansi terkait untuk membayarkan iuran BPJS para karyawannya. "Di undang-undang sudah ada aturannya. Sekian persen dipotong dari gaji dan sekian persen dibayar oleh perusahaan. Dan ini berlaku untuk perusahaan negeri seperti RSUD dan swasta," papar Aman.

Namun Aman yakin, dirut baru RSUD mampu menyelesaikan persoalan lama tersebut. (rng/eja)



Dari 1.700 Hanya 400 Angkot Laik Jalan

Sopir Metro Trans Tolak Taksi Online

BATAMKOTA (BP) - Per-satuan Sopir Metro Trans Batuaji (Persomet) berunjuk rasa di depan Gedung Wali Kota Batam, Kamis (8/3). Mereka menolak kehadiran transportasi *online* berplat hitam dan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam segera menertibkan angkutan yang tak berizin tersebut.

"Kami tolak mobil plat hitam. Mereka orang kaya, bisa kre-

dit mobil, sementara kami orang miskin," teriak Binsar Panjaitan, salah seorang koordinator Persomet, kemarin.

Diakui dia, semenjak kehadiran angkutan *online* pendapatan mereka menjadi sangat berkurang. Apalagi kendaraan plat hitam secara terang-terangan mengambil sewa mereka.

Dari 1.700 Hanya 400 Angkot Laik Jalan

Sambungan dari hal 9

Sementara di sisi lain jumlah penumpang saat ini makin berkurang, jadi tak sebanding. "Sudah makin sepi sejak ada plat hitam (*online*) ini," ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam Yusfa Hendri mengakui pemerintah daerah tak bisa menutup aplikasi yang tak melengkapi izin tersebut. Sebab, kata dia, yang bisa menindaklanjuti adalah Kominfo. "Upaya kami hanya menertibkan angkutan *online* ini. Terbukti sejak akhir 2016 lalu sampai saat ini, kita sudah menahan 450 mobil plat hitam *online* ini," sebut Yusfa.

Mekanismenya, kata Yusfa, mobil tersebut ditilang pihak kepolisian karena belum memiliki izin dan dititipkan di Dishub. Selanjutnya mobil ini

bisa dilepas jika proses perizinan telah selesai, atau mereka buat perjanjian tidak beroperasi lagi.

Selain angkutan *online* tak berizin, sambungnya, pihaknya juga menertibkan kendaraan umum yang berizin tapi tidak sesuai aturan, semisal tidak melakukan uji KIR, tidak melakukan peremajaan, atau kendaraan yang tidak layak beroperasi. "Tadi juga kita sampaikan pada mereka (Persomet), dari 1.700 angkutan kota saat ini hanya 400 unit saja laik beroperasi," jelasnya.

Diakui Yusfa bahwa permasalahan inilah yang dihadapi Dishub saat ini. Di satu sisi banyaknya angkutan kota yang sudah tak laik jalan, ditambah lagi dengan hadirnya taksi *online* yang sampai saat ini belum ada satupun yang me-

miliki izin.

"Ini yang jadi PR (Pekerjaan Rumah) kami saat ini. Kita sudah sampaikan kepada badan usaha angkutan kota untuk melengkapi kewajiban mereka sesuai perda dan perwako. Kita berikan waktu enam bulan," tambahnya.

Jika badan usaha tetap tidak melengkapi hingga masa yang ditentukan, tidak menutup kemungkinan ada tindakan tegas dari Dishub. "Jadi bukan yang tidak berizin saja, angkutan kota yang tidak sesuai aturan juga kita tertibkan. Semua harus taat aturan, disana diteribkan disini juga harus ditilang jika memang tidak sesuai aturan," tegas Yusfa.

Pelayanan Angkutan Buruk

Sementara itu, pantauan di

lapangan, pelayanan angkutan umum di Batam masih sangat buruk. Sebagian besar angkutan umum dalam kondisi tak laik beroperasi. Selain bentuk fisik yang memprihatinkan, mesin kendaraan sering mengalami kerusakan.

Seorang pengguna angkutan, Masturah meminta pemerintah untuk mengkandangan angkot-angkot tak laik jalan tersebut. "Kami pengguna angkutan umum juga merasa tak nyaman," ujarnya.

Dia mengatakan, angkot yang berseliweran di jalan Batam juga diklaim penyumbang kemacetan serta sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Banyak sopir angkot yang kerap melanggar rambu lalu lintas seperti menerobos lampu lalu lintas, berhenti tak sesuai rambu dan masih ba-

nyak lagi. "Sudah berapa kali angkot yang terjungkal di jalan karena ugal-ugalan sopirnya. Kami pengguna angkutan kan jadi takut," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan tak bisa mengambil tindakan terburu-buru. "Kalau saya hentikan mendadak tak ada pengganti kan masalah juga," kata Rudi, belum lama ini.

Salah satu langkah yang kini tengah diusahakan Pemko Batam, yakni meminta tambahan bus angkutan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat. "Kami sudah minta, jadi pelan-pelanlah (penanganan transportasi). Mudah-mudahan saja dikasih 50 unit," harapnya. (une/rng)

Larangan Bangun Kios Liar Diabaikan

Camat Janji Akan Menertibkan

ALFIAN LUMBAN GAOL, Batuaji

PEMBANGUNAN kios liar di ruang terbuka hijau (RTH) di dekat pasar seken Aviari terus berlanjut. Padahal, sudah ada surat larangan dari Camat Batuaji Ridwan untuk menghentikan pembangunan kios tersebut. Pantauan *Batam Pos* di lokasi, Kamis (8/3), tampak dua pekerja sedang mengaduk campuran semen untuk membangun kios menghadap ke Perumahan Pemda 2. Di deretan kios tersebut, sudah ada sekitar 10 kios yang hampir selesai pembangunannya. Sementara puluhan kios lainnya sudah dipasang atap.

Ketika *Batam Pos* hendak bertanya, kedua pekerja tersebut enggan berkomentar. Me-

reka diam dan tetap melanjutkan pekerjaannya.

Seorang warga Pemda 2 mengaku bahwa pembangunan kios itu sudah lama berlangsung. Sekitar sebulan setelah kebakaran di sekitar kawasan itu 2017 lalu. "Setahu saya surat larangan untuk pembangunan kios juga sudah ada. Tapi tak dihiraukan. Camat sepertinya diabaikan," katanya.

Camat Batuaji Ridwan mengaku kecewa peringatan darinya diabaikan. Bahkan ia mengaku surat tersebut sudah disampaikan, agar di RTH tersebut tidak dibangun kios liar. "Saya heran kenapa masih saja tetap dibangun, kita sudah layangkan surat agar dihentikan pembangunannya," kata Ridwan.



K. ALFIAN LUMBAN GAOL/BATAM POS

SEORANG pekerja membangun kios liar di ruang terbuka hijau dekat pasar seken Aviari, Kamis (8/3).

Tetapi ia memastikan, dalam waktu dekat akan menertibkan kios liar tersebut bersama dengan Satpol PP Kota Batam. Menurutnya, kios itu ilegal dan tidak boleh berdiri di sana. "Saya pastikan, bersama Satpol PP, kios itu akan dibongkar."

Saya akan segera menyurati Satpol PP," katanya. Menurutnya, saat ini RTH di Batam sangat terbatas. Karena itu, RTH yang ada harus dijaga bersama. Selain untuk menopang fungsi penghijauan, juga memperindah

estetika kawasan. "Kan sangat bagus kalau itu dibangun untuk taman keluarga. Bukan untuk kios liar yang menguntungkan segelintir orang. Saya ulangi lagi, itu akan dibongkar," tegasnya.***

SMK Widya 2 Siap Ikut...

menyampaikan bentuk kepedu-

HIBURAN



F. SUWARSO UNTUK BATAM POS

PERFORMA grup musik yang membawakan lagu-lagu berirama jazz di Bandara Hang Nadim Batam, Rabu (7/3) lalu.